

### PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG **INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Sutan Syahrir No. 238 🕿 ( 0752 ). 84506 Padang Panjang 27118 Email: inspektoratpadangpanjang@gmail.com

## LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA **INSTANSI PEMERINTAH DAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024**

OPD

: DINAS SOSIAL PPKBPPPA

**KOTA PADANG PANJANG** 

NOMOR

: 700/39/ITDA-PP/V-2025

TANGGAL: 14 MEI 2025



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 🖀 ( 0752 ). 84506 Padang Panjang 27118 Email:itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor

700/39/Itda-PP/V-2025

Padang Panjang, 14 Mei 2025

Lampiran

. .

Perihal

Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penilaian Kinerja

Organisasi Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Sosial, PPKBPPPA Kota Padang Panjang

di

**Padang Panjang** 

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Dinas Sosial, PPKBPPPA Padang Panjang Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut:

#### I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi pada Dinas Sosial, PPKBPPPA Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

#### II. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Tahun sebelumnya, Dinas Sosial, PPKBPPPA belum menindaklanjuti secara keseluruhan rekomendasi hasil evaluasi. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, IKU, dan Rencana Aksi Dinas Sosial, PPKBPPPA Telah diupload pada website resmi Pemerintah Daerah yakni www.padangpanjang.go.id

#### III. Hasil Evaluasi SAKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi

#### A. Hasil Evaluasi SAKIP

Hasil evaluasi Dinas Sosial, PPKBPPPA Padang Panjang memperoleh nilai 69,30 atau predikat B (Baik). Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70	
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,50	
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,85	
4.	Evaluasi Internal	25	17,25	
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,30	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			В	

Komponen penilaian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Kinerja

Dinas Sosial, PPKBPPPA telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara berjenjang yang selaras dengan Rencana Strategis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan existing. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan belum sepenuhnya mengidentifikasi seluruh critical success factor atas pencapaian kinerja dalam proses penyusunannya sebagaimana tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II poin (2).
- b. Crosscutting belum menggambarkan keterkaitan Dinsos dengan OPD Lain dalam pencapaian sasaran strategis (Eksternal) dan antar bidang dalam pencapaian sasaran program.

#### 2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Sosial, PPKBPPPA Padang Panjang, yaitu:

- a. Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja terutama dalam memonitor capaian atas kinerja secara berkala.
- b. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian reward dan punishment, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kota Padang Panjang.
- c. Pemantauan atas pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang, pengukuran kinerja baru mengukur PK eselon II dan III

#### 3. Pelaporan Kinerja

Dinas Sosial, PPKBPPPA telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan Kinerja di Dinas Sosial, PPKBPPPA Padang Panjang, yaitu:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan standar.
- b. Laporan akuntabilitas kinerja belum menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Sosial, PPKBPPPA Padang Panjang namun belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti sesuai dengan saran tim evaluator.

#### B. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi diperoleh dari hasil perkalian normalisasi capaian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi	Capalan (%)	Normalisasi Capalan PK (1)	Koreksi Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capalan PK (3) = (1) x (100% - (2))
1	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PPKS yang tertangan	92%	97%	105,43	105,43	15%	89,62
2	Meningkatnya pemenuhan hak anak.	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesual standar	83,50%	0	0	0,00	0%	0,00
3	Meningkatnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE (Anugrah Parahita Eka Praya)	Madya	0	0	0,00	0%	0,00
4	Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,35	2,43	96.71%	110,00	15%	93,50
5	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang beresiko stunting	Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kelahiran	70%	74%	105,71	105,71	15%	89,86
Total Capalan PK (4)								
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								
Predikat PKO								Kurang

#### IV. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Dinas Sosial, PPKBPPPA Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

#### a. Perencanaan Kinerja.

- Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- Menyempurnakan crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

#### b. Pengukuran Kinerja

- 1. Pimpinan organisasi selaku pengambil keputusan (Decision Maker) ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala.
- Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.
- 3. Melaksanakan pemantauan atas pengukuran kinerja secara berjenjang.

#### c. Pelaporan Kinerja

Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai dengan standar dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

#### d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Dinas Sosial, PPKBPPPA Padang Panjang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan implementasi SAKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.

Inspektur,

Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE

Pembina Utama Muda/NIP. 197004051997031004